

Determinan Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Yowana Rachma Mutmaina

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

e-mail korespondensi: marthynl@yahoo.co.id

Abstract.

This study aimed to analyze: 1) The allocation of personnel expenditures in the district/city in Jambi Province. 2) Factors affecting personnel expenditure in the Regency / City in Jambi Province. The data used is secondary data based on panel data. The analysis tool used is panel data regression analysis. The results of the study found that: 1) During the period 2010-2014, the development of personnel spending in districts / city in Jambi Province showed an increasing trend; 2) The number of employees has a significant negative and significant impact on the expenditure of district / municipality employees in Jambi Province, while the number of Local Government's Agencies (SKPD) has a positive and significant impact.

Key Word : Personnel Expenditure, employees dan Local Governments' Agencies

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Alokasi belanja pegawai kabupaten/kota di Provinsi Jambi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pegawai pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Data yang digunakan adalah data sekunder berdasarkan data panel. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) Selama periode 2010-2014, perkembangan belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat; 2) Jumlah pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja pegawai Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, sedangkan jumlah SKPD berpengaruh positif dan signifikan.

Kata Kunci : Belanja Pegawai, Pegawai, Satuan Kerja Perangkat Daerah

PENDAHULUAN

Desentralisasi dan otonomi daerah yang didorong melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan warna tersendiri dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Penyerahan wewenang ini tentu saja bukan tanpa maksud. Tujuan penyerahan wewenang tersebut selain agar terciptanya suatu organisasi pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, dan tidak korup juga tentunya. Otonomi daerah juga diterapkan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah itu sendiri.

Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, hendaknya Pemerintah

daerah memproporsikan lebih besar belanja modal, agar terciptanya peningkatan infrastruktur yang akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan potensi PAD dari berbagai sektor perekonomian sehingga PAD semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Namun kenyataannya porsi belanja tidak langsung selalu lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Padahal belanja langsung berpengaruh langsung terhadap tingkat perkembangan perekonomian daerah, sehingga seharusnya porsi belanja langsung ini lebih besar daripada belanja tidak langsung. Kondisi ini adalah disebabkan dengan semakin besarnya jumlah PNS dan/atau honorer yang digunakan sebagai aparatur pelaksana di daerah.

Belanja pegawai dalam penelitian ini adalah belanja tidak langsung (Permendagri 13 Tahun 2006) yaitu belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ditambah dengan uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berpagaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaanyang dilakukan.

Belanja pegawai merupakan belanja yang ditujukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan rutin suatu instansi pemerintah, sebagaimana ditentukan dalam tujuan pokok dan fungsinya. Kelompok belanja ini memiliki porsi terbesar dalam struktur belanja yang anggarannya bersumber dari APBN pada sebuah instansi/satuan kerja. Besar anggaran satu satuan kerja/instansi berbeda-beda dengan keragaman jenis belanja yang juga berbeda. Beberapa permasalahan dan resiko yang timbul dalam pelaksanaan belanja pegawai yaitu :

- 1) Kemungkinan adanya data pegawai fiktif.
Kewenangan pengelolaan belanja pada satuan kerja selain dalam hal kemudahan pengelolaan dan pencapaian sasaran program, hal ini dilain sisi juga dapat menimbulkan adanya kegiatan-kegiatan ataupun belanja fiktif yang dapat dimintakan pencairan dananya selama seluruh persyaratan telah dipenuhi.
- 2) Ketidakjelasan jumlah pegawai honorer.
Peningkatan jumlah pegawai honorer tidak disertai dengan kejelasan mengenai jumlah pasti dari pegawai honorer, dan juga banyak terdapat pegawai bayanganyang terdapat didaerah.
- 3) Tidak efisien dalam pembentukan satuan kerja.
Dalam pembentukan satuan kerja sering kali jumlah anggota melebihi dari jumlah anggota yang seharusnya. Hal ini menyebabkan kegiatan yang dilakukan satuan kerja menjadi tidak efisien.
- 4) Pemborosan anggaran.
Pengelolaan belanja pegawai ditujukan untuk pencapaian program satuan kerja. Namun dalam prakteknya efektifitas penggunaan anggaran tidak dijalankan dengan baik, sehingga sering terjadi pelaksanaan kegiatan yang tidak menunjang atau berpengaruh pada pencapaian program yang telah ditetapkan.
- 5) Pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana.
Perencanaan anggaran dilakukan satu tahun sebelum anggaran suatu kementrian/lembaga disetujui. Dalam perencanaan itu setiap satuan kerja melalui kementriannya mengajukan usulan kegiatan dan anggaran yang akan dijalankan

selama satu tahun kedepan. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi permasalahan yang timbul yang pada akhirnya menyebabkan tidak terlaksananya suatu kegiatan yang telah direncanakan.

Rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah terhadap pembayaran gaji pegawai PNSD. Semakin besar rasionya maka semakin besar belanja daerah yang dibelanjakan untuk membayar gaji pegawai daerah dan sebaliknya, semakin kecil angka rasionya maka semakin kecil belanja daerah yang dipergunakan untuk membayar gaji pegawai daerah. Pada tahun 2010 proporsi belanja pegawai kabupaten/kota di Provinsi Jambi terhadap total belanja daerah adalah sebesar 43,9%. Pada tahun 2010 yang memiliki proposi belanja pegawai paling kecil adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 27,7%, sedangkan yang memiliki proporsi paling besar adalah Kota Jambi yaitu sebesar 63,1%.

Penganggaran biaya yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Namun, fenomena penganggaran biaya pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada alokasi belanja pegawai, ditemukan persentase belanja pegawai tidak langsung rata-rata sebesar 50% yang digunakan untuk membiayai gaji pegawai dan sisanya untuk belanja lainnya. Kesenjangan ini tentunya berdampak pada pencapaian keberhasilan pembangunan, dikarenakan belanja pegawai sebagai anggaran belanja terbesar yang menyerap dana APBD, dimana idealnya belanja modal seharusnya lebih besar dari belanja pegawai karena belanja modal secara langsung digunakan untuk kepentingan publik.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Alokasi belanja pegawai kabupaten/kota di Provinsi Jambi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pegawai pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

METODE

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel yaitu kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama Tahun 2010-2014. Data bersumber dari instansi teknis terkait seperti: Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Untuk menganalisis alokasi belanja pegawai dilakukan secara deskriptif berdasarkan data belanja pegawai dalam Laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Tahun Anggaran 2010-2014 dengan menggunakan analisis regresi data panel, dengan persamaan sebagai berikut:

$$BP = \alpha_i + \beta_1 JP + \beta_2 JS + e_i$$

dimana :

- BP = Belanja pegawai
- JP = Jumlah pegawai
- JS = Jumlah SKPD
- α_i = Konstanta
- β_1 - β_2 = Koefisien regresi
- e_i = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alokasi Belanja Pegawai kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi dari tahun ke tahun secara nominal mengalami peningkatan. Berdasarkan Tabel 1. Terlihat bahwa secara rata-rata pertumbuhan belanja pegawai kabupaten/kota pada periode tahun 2010 sampai dengan 2014 meningkat sebesar 14,75%. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada Kabupaten Merangin dengan rata-rata sebesar 19,94 persen pertahun. Sebaliknya pertumbuhan belanja pegawai terendah yaitu Kabupaten Kerinci, dengan rata-rata sebesar 5,31% pertahun.

Tabel 1. Perkembangan Belanja Pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 (dalam Juta Rupiah)

No.	kabupaten/kota	Tahun					Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Batanghari	247,773	288,983	308,207	386,504	421,429	14.43
	<i>Perkembangan (%)</i>		16.63	6.65	25.40	9.04	
2	Bungo	292,507	348,219	378,226	481,663	504,002	14.91
	<i>Perkembangan (%)</i>		19.05	8.62	27.35	4.64	
3	Kerinci	277,940	295,994	297,112	326,643	341,110	5.31
	<i>Perkembangan (%)</i>		6.50	0.38	9.94	4.43	
4	Merangin	251,818	273,128	358,514	398,636	513,664	19.94
	<i>Perkembangan (%)</i>		8.46	31.26	11.19	28.86	
5	Muaro Jambi	261,493	333,695	332,101	370,740	439,615	14.34
	<i>Perkembangan (%)</i>		27.61	(0.48)	11.63	18.58	
6	Sarolangun	204,724	253,687	289,641	316,244	364,668	15.65
	<i>Perkembangan (%)</i>		23.92	14.17	9.18	15.31	
7	Tanjabbar	246,679	302,461	336,926	366,393	424,877	14.68
	<i>Perkembangan (%)</i>		22.61	11.39	8.75	15.96	
8	Tanjabt看	200,449	230,974	266,701	281,185	293,856	10.16
	<i>Perkembangan (%)</i>		15.23	15.47	5.43	4.51	
9	Tebo	164,992	234,110	265,471	297,028	331,557	19.70
	<i>Perkembangan (%)</i>		41.89	13.40	11.89	11.62	
10	Jambi	391,037	461,610	520,099	603,878	665,856	14.27
	<i>Perkembangan (%)</i>		18.05	12.67	16.11	10.26	
11	Sungai Penuh	140,692	188,947	194,243	236,976	276,134	18.91
	<i>Perkembangan (%)</i>		34.30	2.80	22.00	16.52	
JUMLAH		2,680,104	3,211,808	3,547,241	4,065,890	4,576,768	14.75

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan RI (data diolah) Tahun 2015

Selanjutnya berdasarkan Tabel 2. berikut terlihat bahwa alokasi belanja pegawai terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode tahun 2010 sampai dengan 2014 secara rata-rata sebesar 50 % per tahun. Bila dilihat dari belanja daerah, alokasi belanja pegawai yang tertinggi yaitu Kota Jambi dengan rata-rata sebesar 57,10%, dan yang terendah yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan alokasi belanja pegawai terhadap belanja daerah yaitu sebesar 30,16%.

Apabila pengalokasian dana APBD kabupaten/kota di Provinsi Jambi seperti yang digambarkan pada Tabel 2. tetap berlangsung dalam jangka panjang, tanpa adanya perubahan yang signifikan untuk mengurangi alokasi belanja pegawai yang tidak produktif, maka diperlukan moratorium perekrutan PNS agar kapasitas perekonomian daerah diharapkan meningkat secara signifikan. Pengalokasian dana belanja pegawai kabupaten/kota secara tidak produktif menjadi penentu utama perlambatan aktivitas perekonomian daerah tersebut. Setiap perubahan alokasi dana belanja pegawai ke berbagai bentuk belanja daerah lainnya akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, komposisi tersebut harus ditinjau kembali untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Tabel 2. Rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kotadi Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 (dalam Juta Rupiah)

No.	Kab/Kota	Jenis Belanja	Tahun					Rata-rata
			2010	2011	2012	2013	2014	
1	Batanghari	B. Pegawai	247,773	288,983	308,207	386,504	421,429	44.67
		B. Daerah	520,570	589,512	756,140	875,110	1,007,493	
		Rasio (%)	47.60	49.02	40.76	44.17	41.83	
2	Bungo	B. Pegawai	292,507	348,219	378,226	481,663	504,002	47.42
		B. Daerah	706,240	660,642	730,824	1,051,265	1,110,602	
		Rasio (%)	41.42	52.71	51.75	45.82	45.38	
3	Kerinci	B. Pegawai	277,940	295,994	297,112	326,643	341,110	45.58
		B. Daerah	537,886	630,288	700,273	744,853	793,595	
		Rasio (%)	51.67	46.96	42.43	43.85	42.98	
4	Merangin	B. Pegawai	251,818	273,128	358,514	398,636	513,664	46.28
		B. Daerah	550,178	648,321	774,744	859,256	1,010,400	
		Rasio (%)	45.77	42.13	46.28	46.39	50.84	
5	Ma.Jambi	B. Pegawai	261,493	333,695	332,101	370,740	439,615	44.58
		B. Daerah	530,030	658,726	759,551	953,832	1,090,415	
		Rasio (%)	49.34	50.66	43.72	38.87	40.32	
6	Sarolangun	B. Pegawai	204,724	253,687	289,641	316,244	364,668	38.65
		B. Daerah	505,877	624,837	872,293	812,066	911,344	
		Rasio (%)	40.47	40.60	33.20	38.94	40.01	
7	Tanjabbar	B. Pegawai	246,679	302,461	336,926	366,393	424,877	35.07
		B. Daerah	589,741	780,225	900,628	1,279,626	1,480,569	
		Rasio (%)	41.83	38.77	37.41	28.63	28.70	
8	Tanjabt看	B. Pegawai	200,449	230,974	266,701	281,185	293,856	30.16
		B. Daerah	723,277	694,111	857,529	948,779	1,010,131	
		Rasio (%)	27.71	33.28	31.10	29.64	29.09	
9	Tebo	B. Pegawai	164,992	234,110	265,471	297,028	331,557	38.81
		B. Daerah	498,266	571,209	637,123	751,060	856,016	
		Rasio (%)	33.11	40.99	41.67	39.55	38.73	
10	Jambi	B. Pegawai	391,037	461,610	520,099	603,878	665,856	57.10
		B. Daerah	619,303	797,797	902,006	1,114,842	1,264,596	
		Rasio (%)	63.14	57.86	57.66	54.17	52.65	
11	S.Penuh	B. Pegawai	140,692	188,947	194,243	236,976	276,134	39.57
		B. Daerah	328,622	464,917	557,944	642,034	647,460	
		Rasio (%)	42.81	40.64	34.81	36.91	42.65	

Sumber : Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI (data diolah) Tahun 2015

Selanjutnya, Tabel 3. menunjukkan kontribusi belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode tahun 2010 sampai dengan 2014, secara rata-rata sebesar 86,30% per tahun. Bila dilihat dari belanja tidak langsung, kontribusi belanja pegawai yang tertinggi yaitu Kota Jambi secara rata-rata sebesar 94,95%, diikuti oleh Kabupaten Merangin yaitu sebesar 88,15%.

Kontribusi belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung terendah ditempati oleh Kabupaten Batanghari yaitu sebesar 81,81%. Sehingga apabila kontribusi dana APBD kabupaten/kota di Provinsi Jambi seperti yang digambarkan tersebut tetap berlangsung dalam jangka panjang, tanpa adanya perubahan yang signifikan untuk mengurangi kontribusi belanja pegawai yang tidak produktif, maka penggunaan anggaran belanja tidak langsung hanya digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS.

Tabel 3. Perbandingan Belanja Pegawai dan Belanja Tidak Langsung kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 (dalam Juta Rupiah)

No.	Kab/Kota	Jenis Belanja	Tahun					Rata-rata
			2010	2011	2012	2013	2014	
1	Batanghari	B. Pegawai	247,773	288,983	308,207	386,504	421,429	81.81
		BTL	343,337	351,968	363,468	451,604	499,278	
		Rasio (%)	72.17	82.10	84.80	85.58	84.41	
2	Bungo	B. Pegawai	292,507	348,219	378,226	481,663	504,002	86.35
		BTL	357,308	395,329	435,377	539,160	588,988	
		Rasio (%)	81.86	88.08	86.87	89.34	85.57	
3	Kerinci	B. Pegawai	277,940	295,994	297,112	326,643	341,110	83.66
		BTL	359,837	352,022	334,652	394,656	399,263	
		Rasio (%)	77.24	84.08	88.78	82.77	85.43	
4	Merangin	B. Pegawai	251,818	273,128	358,514	398,636	513,664	88.15
		BTL	322,259	313,933	386,649	447,625	547,465	
		Rasio (%)	78.14	87.00	92.72	89.06	93.83	
5	Ma.Jambi	B. Pegawai	261,493	333,695	332,101	370,740	439,615	86.72
		BTL	329,819	397,764	365,044	412,536	490,845	
		Rasio (%)	79.28	83.89	90.98	89.87	89.56	
6	Sarolangun	B. Pegawai	204,724	253,687	289,641	316,244	364,668	83.81
		BTL	273,825	315,171	323,883	367,233	413,322	
		Rasio (%)	74.76	80.49	89.43	86.12	88.23	
7	Tanjabbar	B. Pegawai	246,679	302,461	336,926	366,393	424,877	87.14
		BTL	299,771	348,117	372,959	402,214	499,379	
		Rasio (%)	82.29	86.88	90.34	91.09	85.08	
8	Tanjabt看	B. Pegawai	200,449	230,974	266,701	281,185	293,856	83.64
		BTL	269,258	277,042	305,433	322,880	341,809	
		Rasio (%)	74.45	83.37	87.32	87.09	85.97	
9	Tebo	B. Pegawai	164,992	234,110	265,471	297,028	331,557	86.87
		BTL	210,472	267,974	294,921	341,223	362,148	
		Rasio (%)	78.39	87.36	90.01	87.05	91.55	
10	Jambi	B. Pegawai	391,037	461,610	520,099	603,878	665,856	94.95
		BTL	433,262	489,881	534,561	638,773	676,597	
		Rasio (%)	90.25	94.23	97.29	94.54	98.41	
11	Sei. Penuh	B. Pegawai	140,692	188,947	194,243	236,976	276,134	86.26
		BTL	184,207	219,598	229,977	264,044	291,621	
		Rasio (%)	76.38	86.04	84.46	89.75	94.69	

Sumber : Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI (data diolah) Tahun 2015

Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Estimasi regresi data panel faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) diberikan sebagai berikut:

Pooled Least Square (Common-Constant)

Estimasi regresi data panel dengan model *Pooled Least Square* (PLS) diberikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Estimasi *Pooled Least Square*

Dependent Variable: BP?				
Method: Pooled Least Squares				
Sample: 2010 2014				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 11				
Total pool (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5065794.	696941.7	-7.268604	0.0000
JP?	-43.54083	8.771670	-4.963802	0.0000
JS?	129676.5	16649.92	7.788416	0.0000
R-squared	0.540909	Mean dependent var		328760.2
Adjusted R-squared	0.523252	S.D. dependent var		105328.9
S.E. of regression	72726.40	Akaike info criterion		25.27980
Sum squared resid	2.75E+11	Schwarz criterion		25.38929
Log likelihood	-692.1944	Hannan-Quinn criter.		25.32214
F-statistic	30.63370	Durbin-Watson stat		0.582904
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fixed Effect Model

Estimasi regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) diberikan pada Tabel 5 berikut

Tabel 5. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: BP?				
Method: Pooled Least Squares				
Sample: 2010 2014				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 11				
Total pool (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5653831.	3432519.	-1.647138	0.1070
JP?	-28.50011	32.80502	-0.868773	0.3899
JS?	141677.3	79828.44	1.774772	0.0832
Fixed Effects (Cross)				
_BTH—C	-75715.93			
_BUN—C	1907.201			
_KER—C	75760.73			
_MER—C	-9858.637			
_MJB—C	36233.48			
_SAR—C	-2548.536			
_TJB—C	32340.01			
_TJT—C	-53225.21			
_TEB—C	-48297.51			
_JMB—C	23858.41			
_SPN—C	19545.99			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.646782	Mean dependent var		328760.2
Adjusted R-squared	0.545862	S.D. dependent var		105328.9
S.E. of regression	70980.90	Akaike info criterion		25.38127
Sum squared resid	2.12E+11	Schwarz criterion		25.85573
Log likelihood	-684.9850	Hannan-Quinn criter.		25.56475
F-statistic	6.408889	Durbin-Watson stat		0.728768
Prob(F-statistic)	0.000003			

Random Effect Model

Estimasi regresi data panel dengan *Random Effect Model* diberikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil Estimasi Random Effect Model

Dependent Variable: BP?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Sample: 2010 2014				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 11				
Total pool (balanced) observations: 55				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5058066.	832350.2	-6.076849	0.0000
JP?	-43.08348	10.41686	-4.135939	0.0001
JS?	129448.1	19870.91	6.514455	0.0000
Random Effects (Cross)				
_BTH—C	-15627.80			
_BUN—C	12921.51			
_KER—C	9364.901			
_MER—C	8233.791			
_MJB—C	10987.01			
_SAR—C	1498.419			
_TJB—C	11087.43			
_TJT—C	-19791.64			
_TEB—C	-17895.39			
_JMB—C	1657.723			
_SPN—C	-2435.961			
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			23342.31	0.0976
Idiosyncratic random			70980.90	0.9024
Weighted Statistics				
R-squared	0.460673	Mean dependent var		264860.3
Adjusted R-squared	0.439930	S.D. dependent var		93242.78
S.E. of regression	69780.88	Sum squared resid		2.53E+11
F-statistic	22.20823	Durbin-Watson stat		0.631588
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.540882	Mean dependent var		328760.2
Sum squared resid	2.75E+11	Durbin-Watson stat		0.581430

Pengujian Model**Uji Chow**

Uji Chow digunakan untuk memilih model terbaik diantara dua pendekatan yaitu *Fixed Effect Model* dan *Pooled Least Square* yang akan dipakai model penelitian, dengan syarat : $P\text{-value} < \alpha$ maka H_0 ditolak dan model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* begitu juga jika $P\text{-value} > \alpha$ maka H_0 diterima dan model yang dipilih adalah *Pooled Least Square*.

Hasil estimasi pada Uji Chow diberikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Estimasi Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Pool: Untitled				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	1.258894	(10,42)	0.2841	
Cross-section Chi-square	14.418888	10	0.1547	
Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: BP?				
Method: Panel Least Squares				
Sample: 2010 2014				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 11				
Total pool (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5065794.	696941.7	-7.268604	0.0000
JP?	-43.54083	8.771670	-4.963802	0.0000
JS?	129676.5	16649.92	7.788416	0.0000
R-squared	0.540909	Mean dependent var		328760.2
Adjusted R-squared	0.523252	S.D. dependent var		105328.9
S.E. of regression	72726.40	Akaike info criterion		25.27980
Sum squared resid	2.75E+11	Schwarz criterion		25.38929
Log likelihood	-692.1944	Hannan-Quinn criter.		25.32214
F-statistic	30.63370	Durbin-Watson stat		0.582904
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Uji Chow pada Tabel 7. menunjukkan bahwa nilai Prob. *cross-section F* sebesar 0,2841 dan nilai Prob. *Chi-square* sebesar 0,1547 yang nilainya ($0,2841 > 0,05$) dan ($0,1547 > 0,05$), sehingga H_0 diterima, maka model yang terpilih adalah model PLS.

Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk memilih model terbaik diantara dua pendekatan yaitu *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* yang akan dipakai dalam model penelitian. Dengan statistik uji P-value < α maka H_0 ditolak dan model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* begitu juga jika P-value > α maka H_0 diterima dan model yang dipilih adalah *Random Effect Model*.

Tabel 8. Hasil Estimasi Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Pool: Untitled				
Test cross-section random effects				
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random		0.256627	2	0.8796
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
JP?	-28.500106	-43.083479	967.658729	0.6392
	141677.27782		5977727397.19	
JS?	3 129448.117299		4073	0.8743

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: BP?

Method: Panel Least Squares

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 11

Total pool (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5653831.	3432519.	-1.647138	0.1070
JP?	-28.50011	32.80502	-0.868773	0.3899
JS?	141677.3	79828.44	1.774772	0.0832

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.646782	Mean dependent var	328760.2
Adjusted R-squared	0.545862	S.D. dependent var	105328.9
S.E. of regression	70980.90	Akaike info criterion	25.38127
Sum squared resid	2.12E+11	Schwarz criterion	25.85573
Log likelihood	-684.9850	Hannan-Quinn criter.	25.56475
F-statistic	6.408889	Durbin-Watson stat	0.728768
Prob(F-statistic)	0.000003		

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 8. diketahui bahwa nilai Prob. *Cross section random* sebesar 0,8796, yang nilainya ($0,8796 > 0,05$), sehingga H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Lagrange Multiplier (LM Test)

Uji Lagrange Multiplier (*Breusch – Pagan Random Effect*) digunakan untuk memastikan model yang akan di pakai. Dasar dilakukan uji ini adalah apabila hasil Uji Chow dan Uji Hausman tidak konsisten.

Tabel 9. Hasil Estimasi Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 25/07/16 Time: 11:08

Sample: 2010 2014

Total panel observations: 55

Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	26.07396 (0.0000)	21.93326 (0.0000)	48.00722 (0.0000)
Honda	5.106267 (0.0000)	4.683296 (0.0000)	6.922266 (0.0000)
King-Wu	5.106267 (0.0000)	4.683296 (0.0000)	6.687522 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	48.00722 (0.0000)

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 9. diketahui bahwa nilai Prob. *Breusch-Pagan* (BP) sebesar 0,0000, yang nilainya ($0,0000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa model yang cocok adalah *Random Effect Model* (REM).

Pengujian Hipotesis dan Interpretasi Model REM

Berdasarkan nilai F-statistik yaitu sebesar 30,064 dengan nilai Prob. 0,0000, menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) jumlah pegawai dan jumlah SKPD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pegawai. Hasil perhitungan nilai R square yang sebesar 0,540909. Hal ini menunjukkan bahwa 54,10% naik turunnya jumlah pegawai dan jumlah SKPD mempengaruhi besar kecilnya belanja pegawai, sedangkan sisanya sebesar 45,90% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model.

Selanjutnya berdasarkan uji t, dapat dikemukakan bahwa secara parsial baik variabel jumlah pegawai (JP) dan jumlah SKPD (JS) berpengaruh signifikan terhadap belanja pegawai (dengan nilai Prob. masing-masing 0,0001 dan 0,0000). Jumlah pegawai memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap belanja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah pegawai, maka akan menurunkan belanja pegawai dan sebaliknya. Jumlah SKPD memiliki pengaruh positif yang signifikan yang menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah SKPD akan meningkatkan belanja pegawai dan sebaliknya.

Pengaruh negatif dari jumlah pegawai terhadap belanja pegawai pada dasarnya disebabkan bahwa belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah pegawai, tetapi juga ditentukan oleh tingkat golongan dan keberadaan pendapatan diluar gaji dan tunjangan, seperti insentif KDH/WKDH, penunjang operasional pimpinan DPRD serta biaya pungut pajak. Keberadaan pegawai honorer yang jumlahnya cukup besar tetapi dengan alokasi belanja pegawai untuk tenaga honorer relatif kecil diduga menjadi salah satu faktor penyebab hubungan negatif antara jumlah pegawai dengan belanja pegawai

Estimasi *random effect model* juga menunjukkan adanya pengaruh individu dari data *cross-section* (kabupaten/kota) pada konstanta model penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kabupaten Batanghari, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Batanghari akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar -15627,80.
2. Kabupaten Bungo, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Bungo akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar 12921,51.
3. Kabupaten Kerinci, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Kerinci akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar 9364,901.
4. Kabupaten Merangin, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Merangin akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar 8233,791.
5. Kabupaten Muaro Jambi, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Muaro Jambi akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar 10987,01.
6. Kabupaten Sarolangun, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Sarolangun akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar 1498,419.
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Tanjung

Jabung Barat akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar 10987,01.

8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar -19791,64.
9. Kabupaten Tebo, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Tebo akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar -17895,39.
10. Kota Jambi, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kota Jambi akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar 1657,723.
11. Kota Sungai penuh, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kota Sungai penuh akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar -2435,961.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara rata-rata selama periode 2010-2014, perkembangan struktur belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, belanja pegawai yang tertinggi terdapat pada Kota Jambi yaitu rata-rata sebesar 19,94% dan yang terendah adalah Kabupaten Kerinci rata-rata sebesar 5,31%.
2. Dari hasil analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa jumlah pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja pegawai kabupaten/kota di Provinsi Jambi, sedangkan jumlah SKPD berpengaruh positif dan signifikan.

Saran

1. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi perlu melakukan review yang rinci dan menyeluruh terhadap berbagai kebijakan atas inisiatif sendiri dalam hal menaikkan anggaran belanja pegawai, sehingga komposisi anggaran belanja pegawai lebih rasional dan terukur sesuai dengan produktivitas.
2. Kenaikan anggaran belanja pegawai berakibat pada pembebanan anggaran belanja daerah, maka perlu dilakukan dengan cermat, seperti pemekaran SKPD dan penambahan jumlah pegawai CPNS. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan anggaran belanja pegawai dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adijanto. (2014). *Laporan Pelaksanaan Spending Performance dalam Mendanai Pelayanan Publik*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Anggarini dan Puranta. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Basri, H.; Delis, A; Junaidi . (2014). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81-90

- Burhanuddin, Ahmad. (2012). *Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena Flypaper Effect*. Accounting Analysis Journal. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Darmawan dan Anantawikrama. (2015). *Pengaruh alokasi belanja modal dan belanja pemeliharaan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Bangli periode 2009-2013*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Volume 03, No.01 Tahun 2015. Singaraja.
- Darwis.2009. *Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat*. Artikel Ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Devita. A, Delis. A, Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol.2. Nomor 2, Oktober-Desember 2014.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Hendrawati, Suryana. (2011). *Kinerja APBD dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo*. Tesis.Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Jambi. Jambi.
- Junaidi, J. (2015). Bentuk Fungsional Regresi Linear (Aplikasi Model dengan Program SPSS). Jambi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- Rachmad, Agus. (2010). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Batang Hari*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Jambi.
- Rahman, Fathor. (2013). *Analisis Pengaruh Determinan Belanja Daerah dan PAD di Provinsi Jambi*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Jambi.
- Rekanaharto.(2014). *Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2003-2012*.
- Rodianto, Bambang. (2012). *Analisis Determinasi Alokasi Anggaran dan Struktur Belanja Pegawai pada Kabupaten Bungo*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Jambi.
- Supriyani. (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Wilayah Pulau Sulawesi*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Sulawesi.

Wahyudi. (2011). *Pengaruh Alokasi Belanja Daerah untuk Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum Terhadap Penanggulangan Kemiskinan*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.